J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.4, No.3, April 2025

Kepemimpinan Gender dalam Pengambilan Keputusan Pemerintahan di Kota Baubau

Adefitri Amalia[1], Junaid Gazalin[2], Wa Ode Suharni3, Ratna[4], La Ode Muhammad Arham[5]
[1,2,3,4,5]Muhammadiyah Buton
E-mail: fitri.fitry654@gmail.com[1], junaidgazalin@gmail.com[2], suharnivivo9@gmail.com[3], maryamjora30122@gmail.com[4], arhamode108@gmail.com[5]

Article History:
Received: 10 Februari 2025
Revised: 21 Maret 2025
Accepted: 27 Maret 2025

Keywords: *Gender, Women, Leadership*

Abstract: *This article examined gender in leadership which is still be a topic of discussion that attracts a lot of attention. Which aims to discuss women's leadership style, leadership effectiveness, relations of gender in leadership, the glass ceiling and labyrinth which is barriers in leadership for women, and the motive of removing gender barriers in leadership. This article used the literature review method, with references from several previous studies that raised similar topics. Based on the sources that have been collected, the results of this literature review revealed that gender is still a significant factor in leadership practice, especially in high levels of leadership dominated by men. In addition, research shows that there are differences in leadership styles between men and women. Men tend to attach importance to aspects of duty and authority, while women tend to use a participatory and relationship-building approach. Both of these leadership styles have their own advantages and disadvantages, and it is important to consider the context of the organization and the associated tasks.*

PENDAHULUAN

Kepemimpinan dalam pemerintahan memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan dan kebijakan publik. Di era modern, perhatian terhadap kepemimpinan gender semakin meningkat seiring dengan tuntutan akan kesetaraan dan inklusivitas dalam berbagai sektor, termasuk pemerintahan Kota Baubau, sebagai salah satu kota di Sulawesi Tenggara juga mengalami dinamika dalam kepemimpinan gender, terutama dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Sejarah panjang perjuangan perempuan untuk mendapatkan hak yang setara dalam berbagai bidang, termasuk politik, menjadi latar belakang penting dalam memahami pentingnya isu kepemimpinan gender. Di Indonesia, representasi perempuan dalam politik telah meningkat secara bertahap melalui berbagai kebijakan afirmatif, seperti kuota keterwakilan perempuan dalam legislatif. Namun, tantangan dalam mengubah norma-norma budaya dan stereotip gender masih menjadi pekerjaan besar, khususnya di daerah-daerah dengan akar budaya patriarki yang kuat seperti Kota Baubau. Kepemimpinan gender bukan hanya soal meningkatkan jumlah perempuan dalam posisi strategis, tetapi juga memastikan bahwa suara perempuan dapat memengaruhi kebijakan yang diambil. Dalam konteks pemerintahan lokal, pengaruh ini terlihat dalam bagaimana kebijakan disusun untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang beragam. Pemimpin perempuan

sering kali membawa perspektif yang lebih inklusif, yang mencakup perhatian terhadap isu-isu sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan komunitas.

Di sisi lain, kajian tentang kepemimpinan perempuan juga mengungkapkan bahwa mereka sering kali menghadirkan gaya kepemimpinan yang lebih kolaboratif. Dalam pengambilan keputusan, pemimpin perempuan cenderung melibatkan lebih banyak pihak dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang, sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih holistik dan relevan bagi masyarakat luas. Pendekatan ini, meskipun sangat efektif, sering kali bertentangan dengan ekspektasi masyarakat yang masih mengutamakan gaya kepemimpinan otoriter yang dianggap lebih "tegas" dan "kuat." Gender dalam konteks kepemimpinan mengacu pada bagaimana pengalaman, karakteristik, dan stereotip gender memengaruhi kemampuan seseorang memimpin. Laki-laki sering diasosiasikan dengan gaya kepemimpinan tegas dan berorientasi pada tugas, sedangkan perempuan diasosiasikan dengan gaya yang kolaboratif dan berorientasi pada hubungan interpersonal. Gaya Kepemimpinan Berdasarkan Gender ,Penelitian menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan dapat memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda. Sedangkan Perempuan lebih banyak menggunakan pendekatan transformasional, yaitu memotivasi dan memberdayakan tim. Lebih fokus pada membangun hubungan, kerja sama tim, dan menciptakan lingkungan yang suportif. Pendekatan ini sering dianggap lebih efektif dalam menciptakan hubungan jangka panjang di tempat kerja..sedangka Laki-laki:Lebih sering menggunakan pendekatan transaksional, yaitu fokus pada struktur, aturan, dan pencapaian target.,Gaya ini dapat lebih cocok untuk organisasi yang memprioritaskan efisiensi dan pengambilan keputusan cepat. **(sumbernya)**

Upaya meningkatkan kesetaraan gender dalam kepemimpinan adalah langkah-langkah strategis untuk memastikan perempuan dan laki-laki memiliki peluang yang setara untuk menduduki posisi kepemimpinan, baik di sektor publik, swasta, maupun masyarakat luas. Namun, gaya kepemimpinan ini tidak selalu tetap dan dapat bervariasi tergantung pada individu dan situasi.Walaupun perempuan semakin banyak masuk ke posisi kepemimpinan, mereka sering menghadapi tantangan berikut:Stereotip Gender:Pemimpin perempuan sering dianggap kurang tegas atau tidak kompeten dalam situasi yang menuntut keberanian mengambil risiko,Jika mereka menunjukkan ketegasan, mereka sering dianggap "terlalu agresif.",Glass Ceiling (Langit-langit Kaca): Hambatan tak kasat mata yang membuat perempuan sulit mencapai posisi kepemimpinan tertinggi meskipun memiliki kualifikasi. Double Burden yaitu perempuan sering kali harus mengelola peran ganda sebagai pekerja dan pengurus rumah tangga, yang dapat membatasi waktu dan energi mereka. Kurangnya Representasi di banyak organisasi atau institusi, perempuan masih kurang terwakili di tingkat pengambil keputusan. (sumbernya)

Menurut Abdurrahman Wahid, para akademisi yang menganggap perempuan lebih lemah dari laki-laki adalah keliru. Berbeda dengan realitas sejarah, perempuan tidak memiliki kapasitas untuk memimpin jika berhadapan dengan laki-laki. Beberapa wanita telah memegang posisi kekuasaan sepanjang sejarah, termasuk Ratu Balqis, Cleopatra, Margaret Theatcher, Benazir Bhutto, dan Corie Aquino. Abdurrahman Wahid sangat menerima kualifikasi Megawati Soekarnoputri sebagai presiden**.**

Meski demikian, di Kota Baubau, perempuan masih menghadapi hambatan struktural dan budaya yang membatasi peran mereka dalam pemerintahan. Persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan cenderung dipengaruhi oleh stereotip gender yang meremehkan kemampuan mereka. Selain itu, kurangnya akses terhadap pelatihan dan peluang pengembangan kapasitas juga menjadi faktor yang menghambat keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk mengupas lebih dalam bagaimana kepemimpinan gender memengaruhi proses pengambilan keputusan di pemerintahan Kota Baubau. Dengan memahami

faktor-faktor yang mendukung dan menghambat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk mendorong peningkatan peran perempuan dalam kepemimpinan dan pengambilan kebijakan yang lebih inklusif di tingkat lokal. Fokus pada konteks Kota Baubau juga memberikan gambaran unik tentang bagaimana nilai-nilai budaya lokal dapat memengaruhi dinamika kepemimpinan gender.

METODE PENELITIAN

Metode penyusunan jurnal ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui studi pustaka (library research) yaitu mencari atau menemukan data dari berbagai sumber yang relevan dengan konsep umum pengaruh kepemimpinan gender dalam pengambilan keputusan pemerintahan di kota Baubau, kemudian dilengkapi dengan pemikiran penulis tentang topik yang di sajikan. Sumber data yang diperoleh melalui metode studi pustaka berasal dari buku, jurnal dan riset-riset yang telah dilakukan sebelumnya untuk mengatasi masalah melalui penelaahan kritis (Fadli, 2021). Studi Pustaka adalah bagian mendasar dari suatu kerangka penelitian untuk mendukung penelitian lain yang sesuai dan memperdalam kajian pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gender merupakan perbedaan yang terlihat antara laki – laki dan perempuan dan gender merupakan status sosial yang ditimbulkan secara biologis sebagai laki – dan perempuan serta sifat dan perilaku yang melekat kepada gender tersebut. Secara lahiriah laki – laki memiliki sifat yang tegas dan memiliki otoritas yang tinggi sedangkan perempuan lebih kepada lemah lembut dan situasional dengan keadaan lingkungan sekitar. Perbedaan gender tersebut sering juga dikaitkan dengan gaya kepemimpinan seorang pemimpin dalam suatu organisasi. dalam suatu organisasi kerja secara tidak langsung gender mempengaruhi gaya kepemimpinan dari masing – masing pihak.

Menurut Tinker seperti yang dikutip Susanti menyatakan bahwa kaum perempuan dipandang dari berbagai sisi masih sering mendapat perlakuan yang tidak adil karena kedudukan perempuan khususnya di Indonesia masih mengalami subordinasi, perendahan, pengabaian, eksploitasi, dan pelecehan seksual, bahkan tindak kekerasan ,Tampaknya kita perlu mencermati masalah perempuan dalam suatu pandangan yang berorientasi gender dan memberi tempat yang prioritas untuk kebutuhan perempuan yang diharapkan dapat merubah realitas untuk kesetaraan gender.

Untuk mengubah kondisi tersebut maka diperlukan perspektif gender dalam melihat persoalan perempuan dan mencari solusinya “Gender” sebagai pembebasan perempuan untuk mengembalikan perempuan pada hakikinya. Perubahan sosial yang selama ini bersifat endosentris dapat dilihat sebagai ketimpangan struktural dalam perspektif gender. Perbedaan fundamental dari kategori biologis antara laki-laki dan perempuan yang pada hakekatnya tidak perlu dipertanyakan, tetapi pada tingkat sosiokultural, perbedaan fundamental tersebut seolah-olah diterima sebagai “kebenaran”. Padahal kultur adalah hasil dari suatu konsensus dan setiap konsensus tidak pernah selesai atau berhenti di titik final, termasuk dalam hubungan laki-laki dan perempuan. Perbedaan laki-laki dan perempuan memang final, namun jika hal itu diterapkan di tingkat sosiokultural, yang terjadi adalah distorsi, bias, atau bahkan ketimpangan dan ketidakadilan. Permasalahan gender yang dipengaruhi oleh perubahan sosial, maupun kultur budaya disikapi para koreografer perempuan dengan menciptakan karya tari yang mempunyai tema gender. Hasil koreografi tersebut sebagai media dalam mengekspresikan realita kehidupan perempuan dan sebagai wadah keluh kesah para perempuan karena mendapat perlakuan yang tidak adil oleh laki-laki.

Di Indonesia sendiri ketidaksetaraan gender masih seringkali terjadi. Kondisi yang berkembang selalu mengarahkan perempuan dijadikan second human being yang mengakibatkan perempuan selalu berada dibawah superioritas laki-laki dan membawa implikasi luas dalam kehidupan politik, sosial dan budaya di masyarakat. Isu gender mendapat perhatian yang kian meningkat di banyak bidang ilmu sosial dalam dekade terakhir ini. Dalam melaksanakan berbagai aktivitas sosial, gender penting untuk dipahami, untuk melihat apakah perbedaan yang bukan alami ini telah menimbulkan diskriminasi dalam arti perbedaan yang membawa kerugian dan penderitaan terhadap perempuan. Dalam perpolitikan di Indonesia perempuan merupakan kaum minoritas, dilihat dari komposisi perempuan di Indonesia lebih dari 50% penduduk Indonesia adalah perempuan. Namun dalam keterwakilan perempuan dalam kehidupan politik masih jauh dari yang diharapkan. Undang Undang menjamin hak keterwakilan perempuan dalam kekaryaannya di berbagai jabatan publik, misalnya, pasal 46 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM menyebutkan bahwa, sitem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif dan sitem pengangkatan di bidang eksekutif, judikatif harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan. Demikan pula, pasal 49 ayat (1) UU tersebut menyebutkan bahwa, wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang undangan (Departemen Hukum dan Ham).

Pendidikan politik adalah suatu aktivitas yang bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan orientasiorientasi politik pada setiap individu maupun kelompok. Proses pendidikan politik dilakukan agar masyarakat luas dapat menjadi Warga Negara Indonesia yang sadar dan menjunjung tinggi akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan bernegara, serta memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender. Hal ini ditekankan karena pada realitasnya, masih dirasakan adanya kesenjangan antara peranan yang dilakukan oleh kaum pria dan perempuan pada berbagai peran, utamanya pada peran-peran publik.

Memperluas konsep gender dengan mempertimbangkan keragaman identitas seksual dan variasi biologis yang ada di luar biner laki-laki dan perempuan. Ia menekankan bahwa gender adalah konstruksi sosial yang kompleks, yang melibatkan faktor-faktor biologis, budaya, dan individual dalam membentuk identitas gender seseorang. Ia menyoroti pentingnya mempertimbangkan keragaman identitas seksual dan variasi biologis yang ada di luar biner laki-laki dan perempuan. Dia menekankan bahwa gender bukanlah sekadar pembagian dua kategori yang terpisah, tetapi jauh lebih kompleks dan inklusif. Fausto-Sterling menyoroti keragaman identitas seksual yang melampaui batasan konvensional laki-laki dan perempuan. Dia mengakui bahwa ada spektrum yang luas dalam hal preferensi seksual dan identitas gender. Melalui pemahaman ini, ia menolak pandangan yang menganggap identitas gender sebagai sesuatu yang tegas terikat pada anatomi tubuh atau orientasi seksual. Fausto-Sterling menekankan variasi biologis yang ada dalam tubuh manusia. Ia menyadari bahwa ada variasi genetik, hormonal, dan fisik yang melebihi pemahaman tradisional tentang biner laki-laki dan perempuan.

Identitas gender seseorang tidak hanya ditentukan oleh faktor biologis tunggal, tetapi juga oleh faktor-faktor budaya, sosial, dan individu yang saling berinteraksi. Fausto-Sterling menyatakan bahwa gender adalah konstruksi sosial yang kompleks. Ia menekankan bahwa identitas gender tidak hanya dibentuk oleh faktor biologis, tetapi juga oleh norma, nilai, dan harapan sosial dalam masyarakat. Identitas gender seseorang dipengaruhi oleh budaya, tradisi, norma-norma gender yang ada, dan interaksi dengan lingkungan sosial. Fausto-Sterling menekankan bahwa faktorfaktor budaya juga berperan penting dalam membentuk identitas gender. Norma dan harapan sosial dalam masyarakat memainkan peran dalam membentuk bagaimana individu mengartikan dan mengungkapkan identitas gender mereka. Faktor-faktor budaya ini dapat

berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya, menciptakan variasi dalam konstruksi gender.

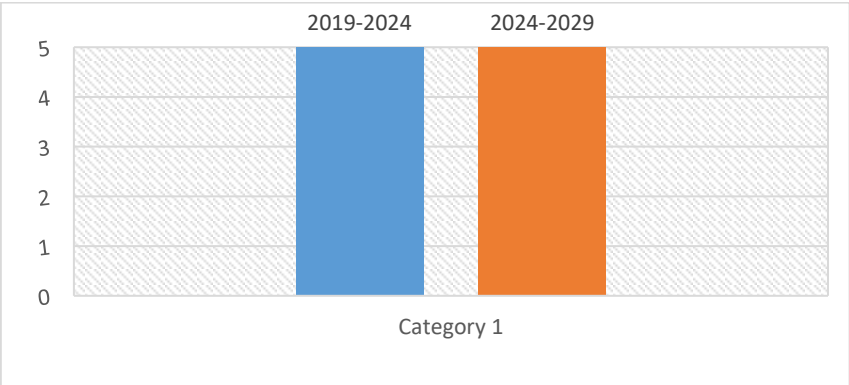
Sesungguhnya, peningkatan peran wanita bukanlah tren apalagi fenomena baru seperti dikatakan sebagian orang.Wanita sebagai kepala pemerintahan telah ada sejak abad ke-15. Kepemimpinan wanita mulai bangkit dari tidur panjang sejak isu hak asasi manusia dan persamaan gender secara lantang disuarakan oleh aktivis feminisme. Kiprah wanita tersebut semakin menonjol pada abad ke-21.Di berbagai negara, sebagian besar wanita mengalami perkembangan dalam berbagai sisi kehidupan atau mobilitas vertikal.

Keterwakilan perempuan dalam Pilkada tahun 2018 di Sulawesi Tenggara menunjukkan atmosfir demokrasi yang ramah tidak biasa gender sekaligus menjadi fenomena kebangkitan perempuan yang ingin disejajarkan dengan kaum laki-laki dipentas politik. Betapa tidak pesta demokrasi yang digelar dari tahun ke tahun di daerah ini baru pelaksanaan Pilkada tahun inilah ada kontestan perempuan, dimana bila kita menengok kebelakang pada pelaksanaan pilkada sebelumnya perempuan hanya sebagai/menjadi wakil Bupati. Gairah politik perempuan yang menunjukkan semangat kompetitor turut mewarnai semaraknya pentas panggung demokrasi, diharapkan berbanding lurus dengan hasil maksimal dengan potensi yang dimilki, bukan hanya sebatas pelengkap pemenuhan pensyaratan bagi partai sebagai peserta pemilu dan bukan pula pelestarian dinasti politik yang nampaknya turut mewarnai pesta demokrasi yang digelar diseluruh nusantara.

Oleh karena itu, menarik untuk kemudian mengkaji peran-peran seperti itu dalam sektor publik di ranah lokal Kota Baubau. Dimana, hari ini sejumlah posisi penting dalam sektor publik misalnya pada sektor birokrasi maupun akademisi diisi oleh perempuan. Tentu ini memberi kondisi baru dalam menyimak dan mengkaji peran tersebut sebagai bagian kajian akademis, utamanya dalam menyoroti gaya kepemimpinan perempuan dalam organisasi dan pengambilan keputusan yang dilakukannya.

Dalam beberapa kasus, perempuan dan kepemimpinan merupakan hal yang belum begitu lazim bagi pemerintahan modern. Hanya saja, selalu saja ada regulasi yang Perempuan dalam posisinya pada ranah public, saat ini terus berkembang. Perempuan mulai berkiprah dalam beberapa posisi strategis di daerah, termasuk sebagai pemimpin pada organisasi maupun instansi di daerah. Penelitian ini memfokuskan kajian pada dua tokoh perempuan, yakni Ibu Maasra Manarfa yang menjabat sebagai Wakil Walikota Baubau dan Ibu Ichsana Maliki yang menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Buton (beliau pensiun pada bulan April 2016, hanya saja dalam proses penelitian yang bersangkutan masih menjabat).

Diagram Caleg perempuan di kota Baubau tahun 2019-2024 & 2024-2029



Grafik 1. Diagram Caleg perempuan di kota baubau tahun 2019-2024 & 2024-2029

Pada Pemilihan Umum tahun 2019 di Kota Baubau, beberapa calon legislatif (caleg) perempuan berhasil terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) periode 2019-2024. Berikut adalah nama-nama caleg perempuan terpilih beserta partai politik dan daerah pemilihan (dapil) mereka:

Dapil Baubau I:
1. Sitti Suhura (Partai Persatuan Pembangunan)
2. Noor Gemilang Siradja (Partai Hanura)

Dapil Baubau II:
1. Roslina Rahim (Partai Perindo)
2. Rosni (Partai Bulan Bintang)

Dapil Baubau III:
1. Farida Gamaruddin (Partai Golkar)

Berdasarkan hasil Pemilihan Umum tahun 2024, berikut adalah anggota perempuan yang terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Baubau untuk periode 2024–2029:

Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Baubau 1 (Betoambari, Murhum, Batupoaro):
1. Noor Gemilang Siradja (Partai Hanura)
2. Nuryani Rahma (Partai Demokrat)

Dapil Kota Baubau 2 (Sorawolio, Bungi, Kokalukuna, Lea-Lea):
1. Naslia Alu (Partai Hanura)

Dapil Kota Baubau 3 (Wolio):
1. Ratna (Partai Hanura)
2. Roslina Rahim (Partai Kebangkitan Nusantara)

Terlepas dari anggapan bahwa peran perempuan cenderung terabaikan dalam kepemimpinan sector public, namun hari ini peran-peran perempuan dalam sector public menjadi begitu penting. Salah satunya sebagai pemimpin dalam pemerintahan daerah, perempuan memberikan gaya kepemimpinan yang lebih terbuka, ketegasan, cara pengambilan keputusan serta cara mengayomi bawahan yang menjadi pembeda dengaan gaya kepemimpinan oleh laki-laki.

KESIMPULAN

Kesimpulan menurut saya tentang Kepemimpinan Gender dalam Pengambilan Keputusan Pemerintahan di Kota Baubau adalah bahwa meskipun sudah ada kemajuan dalam representasi perempuan di pemerintahan, masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk mencapai kesetaraan gender yang sejati. Kota Baubau, seperti banyak daerah lainnya, masih perlu bekerja keras untuk memastikan bahwa perempuan tidak hanya hadir secara simbolis di posisi-posisi kepemimpinan, tetapi benar-benar memiliki kekuatan dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi masyarakat.

Kepemimpinan gender dalam pengambilan keputusan pemerintahan di Kota Baubau mencerminkan pentingnya inklusi dan representasi yang adil antara laki-laki dan perempuan dalam proses pembuatan kebijakan. Meskipun keterwakilan perempuan di pemerintahan Kota Baubau menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu, tantangan seperti stereotip gender, budaya patriarki, dan kurangnya akses ke pendidikan dan pelatihan kepemimpinan masih menjadi hambatan utama.

Adanya kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam politik memberikan peluang lebih besar bagi perempuan untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan. Namun, implementasi kuota ini masih memerlukan pengawasan ketat agar benar-benar efektif. Selain itu,

peningkatan kapasitas perempuan melalui pendidikan, pelatihan kepemimpinan, dan mentoring sangat diperlukan untuk mendorong peran mereka dalam pemerintahan.Perempuan pemimpin di Kota Baubau berpotensi membawa perspektif yang lebih inklusif, kolaboratif, dan empatik dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan daerah, kesejahteraan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan dukungan kebijakan yang ramah gender, partisipasi masyarakat, dan kolaborasi lintas sektor, kepemimpinan gender dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pemerintahan yang lebih adil, inovatif, dan berorientasi pada keberlanjutan.

DAFTAR REFERENSI

Fausto, dan A sterling. "The dynamic development of gender variability." *Journal of Homosexuality*, 2012, 398–421.

Gusmansyah, Wery. "Dinamika Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Politik Di Indonesia." *HAWA* 1, no. 1 (1 Juni 2019). https://doi.org/10.29300/hawapsga.v1i1.2233.

Heraty, toeti Noerhadi. "'Perihal Rekayasa dan Bias Gender'. Dalam Politik dan Gender. Yogyakarta: Yayasan Cemeti." 1, no. 1 (2003).

Intan Baiduri, Nabilatul Hasanah, Fadjar Maulana, dan Mochammad Isa Anshori. "Gender dan Kepemimpinan : Sebuah Kajian Literatur." *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan* 3, no. 2 (22 Juni 2023): 179–204. https://doi.org/10.55606/jimek.v3i2.1782.

Machmud, Hadi. "PEREMPUAN DAN POLITIK LOKAL (STUDI KASUS PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI SULAWESI TENGGARA)." *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian* 14, no. 1 (28 Mei 2019): 91. https://doi.org/10.31332/ai.v14i1.1273.

Marince, Yesi. "PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM KEHIDUPAN POLITIK DI INDONESIA," t.t.

Sahban, Hernita. "PERAN KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DI INDONESIA," 2016.

Siregar, Eka Sri Mulyani, dan Yunia Wardi. "PENGARUH GENDER DAN GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA ORGANISASI." *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT* 11, no. 3 (2 September 2023): 2223–29. https://doi.org/10.37081/ed.v11i3.5058.

Susanti, B, m. "'Penelitian Tentang Perempuan Dari Pandangan Androsentris ke Perspektif Gender'. Dalam EKSPRESI Dari Bias lelaki menuju Kesetaraan Gender Jurnal ISI Yogyakarta." 1, no. 1 (2000).

Whelehan, imelda. "Modern Feminist Thought: From the Secondwaveton 'Post Modernism'. New York: New York University Press." 1, no. 1 (1993).

Wijaya, Andy Arya Maulana. "KEY SUCCES FACTOR KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DI PEMERINTAH DAERAH." *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan* 1, no. 2 (1 September 2016): 48–55. https://doi.org/10.35326/kybernan.v1i2.172.